RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2022

				Rencana Pelaksanaan											
No	Komponen	Isu Permasalahan	Rencana Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	**Manajemen Perubahan**														
	Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal	Pembentukan Tim Reformasi Birokasi												
		Sumber daya manusia yang ada masih belumsecara penuh memahami filosofi dan peran dari agenda reformasi birokrasi	Pelaksanaan Diklat Agen Perubahan												
	Road Map Reformasi Birokrasi	Belum semua sumber daya aparatur memahami rencana kerjaa reformasi birokrasipada unit kerja	Penyusunan Road Map/Rencana Kerja ReformasiBirokrasi pada unit kerja												
			Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana kerja Reformasi Birokrasi												
	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Adanya risiko ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan/kinerja terhadap perencanaan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi												
		Seringkali hasil monitoring dan evaluasi tidak ditindaklanjuti	Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas hasil monitoring dan evaluasi												
	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Kurangnya keterlibatan pemimpin secara aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi												
		Agen perubahan belum menciptakan perubahan secara signifikan	Pemilihan Agen Perubahan dan role model lingkup unit kerja												
2	**Penataan Peraturan Perundang Undangan**														
	Harmonisasi	Masih terdapat peraturan perundang-undanganyang tumpang tindih	Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis												
			Pelaksanaan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis												
3	**Penataan dan Penguatan Organisasi**														
	Evaluasi Kelembagaan	Evaluasi struktur organisasi dan pendelegasianserta pengukuran capaian kinerja belum sesuai dengan cascading	Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi												
			Evaluasi pengukuran jenjang organisasi												
			Evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi												
			Evaluasi kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan												
			Evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya												
			Analisis rentang kendali terhadap struktur yang berada langsung di bawahnya												
			Analisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan												
			Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan												
			Analisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain												

			Analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis												
	Tindak Lanjut Evaluasi	Seringkali hasil evaluasi tidak dilakukan aksi tindak lanjut	Pengajuan perubahan organisasi berdasarkan hasil evaluasi												
			Penyederhanaan birokrasi berdasarkan hasil evaluasi												
4	**Penataan Tata Laksana**														
	Proses bisnis dan prosedur operasionaltetap (SOP) kegiatan utama	Proses bisnis unit kerja masih belum berjalandengan optimal	Penyusunan peta proses bisnis												
		Prosedur operasional tetap (SOP) belum sepenuhnya sesuai dengan peta proses bisnis	Penjabaran peta proses bisnis ke dalam proseduroperasional tetap (SOP)												
			Penerapan prosedur operasional tetap (SOP)												
			Evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi												
	Keterbukaan Informasi Publik	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan optimal	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik												
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik												
5	**Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**														
	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuaidengan kebutuhan organisasi	Perhitungan kebutuhan pegawai belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan hasilanalisis jabatan dan analisis beban kerja	Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unitkerja												
			Analisis jabatan dan analisis beban kerja												
	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi belum berjalan dengan optimal	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi												
			Pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan												
	Penetapan kinerja individu	Penerapan penilaian kinerja individu belum optimal	Penerapan penetapan kinerja individu												
			Penilaian kinerja individu												
			Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu												
	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku pegawai	Masih terdapat sumber daya aparatur yang melanggar aturan disipin/kode etik/kodeperilaku pegawai	Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilakuinstansi												
			Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin												
	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Implementasi standar kompetensi jabatan belum maksimal	Implementasi standar kompetensi jabatan (SKJ)												
			Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ												
	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian yang ada belum menyediakan informasi yang relevan	Maintenance sistem informasi kepegawaian												
6	**Penguatan Akuntabilitas**														
	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan belum terlibat secara aktif dalam penyusunan Renstra organisasi	Pelibatan pimpinan unit kerja dalam penyusunan Renja												
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Kurang optimalnya pengelolaan akuntabilitas kerja pada unit kerja	Peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP												
			Pemutakhiran data kinerja secara berkala												

7	**Penguatan Pengawasan**														
	Gratifikasi	Adanya kondisi yang rentan terhadap perilaku gratifikasi	Melaksanakan *public campaign*												
		Sistem pengendalian gratifikasi belum optimal dilakukan	Implementasi penanganan gratifikasi												
			Evaluasi atas kebijakan penanganan												
			Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi												
	Penerapan SPIP	Pelaksanaan kegiatan seringkali tidak sesuai dengan perencanaan	Identifikasi lingkungan pengendalian												
			Penilaian risiko unit kerja												
			Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi												
			Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)												
			Pemantauan pengendalian intern												
			Evaluasi atas penerapan SPI												
	Pengaduan Masyarakat	Seringkali hasil pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan maksimal	Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat												
			Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat												
			Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat												
	Whistle-Blowing System	Pemahaman yang kurang mengenai Whistle Blowing System	Sosialisasi Whistle Blowing System												
	Penanganan Benturan Kepentingan	Pemahaman yang kurang mengenai benturan kepentingan	Sosialisasi penangan benturan kepentingan												
			Impelementasi penangan benturan kepentingan												
			Evaluasi dan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan												
	Pembangunan Zona Integritas	Belum adanya rencana pembangunan zona integritas	Pencanangan pembangunan zona integritas												
			Pembangunan zona integritas												
			Evaluasi atas pembangunan zona integritas												
8	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**														
	Standar Pelayanan	Kualitas pelayanan publik belum sesuai dengan standar	Pembuatan kebijakan standar pelayanan												
			Review dan perbaikan atas standar pelayanan												
	Budaya Pelayanan Prima	Budaya pelayanan prima masih belum dilaksanakan secara optimal	Peningkatan kemampuan/kompetensi untuk menunjang penerapan budaya pelayanan prima												
			Sosialiasi pelayanan pada berbagai media												
			Monitoring dan evaluasi pelaksanan budaya pelayanan prima												
	Pengelolaan Pengaduan	Media pengaduan dan konsultasi belum menjangkau publik secara luas	Pembuatan media pengaduan dan konsultasi pelayanan												
			Pembentukan unit khusus pengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan												
			Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan												
			Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi												
	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui standar pelayanan dalam sebuah instansipublik	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat												
			Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat												

			Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat												
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TI dalam pelayanan publik di unit kerja belum maksimal	Penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan												
			Perbaikan sistem informasi secara berkala												

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KHUSNUL YAQIN, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670524 199302 1 004